



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKjIP

Tahun Anggaran 2025

Dinas Pemberdayaan Perempuan,  
Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk  
dan Keluarga Berencana  
Kota Salatiga

DP3APPKB

# Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2025



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PELINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
KOTA SALATIGA

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Salatiga Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan tepat waktu. Penyusunan LKjIP ini merupakan salah satu bentuk komitmen DP3APPKB dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), khususnya dalam aspek akuntabilitas kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah kepada masyarakat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama satu tahun anggaran. Dalam laporan ini disajikan hasil pengukuran, evaluasi, dan analisis kinerja DP3APPKB yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra), Perjanjian Kinerja, serta indikator kinerja utama dan indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan. LKjIP ini disusun sebagai sarana evaluasi terhadap pencapaian sasaran strategis sekaligus sebagai dasar perbaikan kinerja pada tahun berikutnya. Penyusunan LKjIP DP3APPKB Kota Salatiga Tahun 2025 tidak terlepas dari dukungan, kerja sama, dan kontribusi berbagai pihak. Oleh karena itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran internal DP3APPKB, perangkat daerah terkait, serta pihak-pihak lain yang telah memberikan masukan dan data dalam penyusunan laporan ini.

Sebagai perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga, DP3APPKB memiliki peran strategis dalam mendorong terwujudnya pembangunan yang responsif gender, ramah anak, serta berorientasi pada kualitas keluarga. Tantangan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, termasuk isu kesenjangan gender, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta dinamika pengendalian penduduk dan keluarga berencana, memerlukan sinergi, inovasi, dan penguatan kolaborasi lintas sektor. Oleh karena itu, penyusunan LKjIP ini juga menjadi instrumen untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan telah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kota Salatiga.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan. Namun demikian, diharapkan LKJIP ini dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai capaian kinerja DP3APPKB Kota Salatiga serta dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi, pengendalian, dan pengambilan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana di masa mendatang. Melalui transparansi dan akuntabilitas yang terus ditingkatkan, DP3APPKB berkomitmen untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kota Salatiga serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berkeadilan dan inklusif.

Akhirnya, kami berharap dukungan dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan tetap terjalin dengan baik pada tahun-tahun mendatang, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi DP3APPKB dapat semakin optimal dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas, perempuan yang berdaya, serta anak yang terlindungi di Kota Salatiga.

Salatiga,

2026

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PELINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KOTA SALATIGA

The image shows a circular official stamp of the DP3APPKB (Department of Women Empowerment, Child Protection, Population Control, and Family Planning) of Salatiga City. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KOTA SALATIGA' and 'DP3APPKB'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

SUPARLI, S.K.M., M.Kes

Pembina TK.I

NIP. 197306161999031007

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja merupakan tahapan akhir dari siklus manajemen kinerja instansi pemerintah yang berfungsi sebagai instrumen evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Setiap instansi pemerintah dibentuk untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tertentu serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Dalam konteks tersebut, penyelenggaraan pemerintahan dituntut untuk dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Salatiga merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kota Salatiga melalui pengarusutamaan gender, pemenuhan hak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk, serta peningkatan kualitas keluarga. Pelaksanaan tugas dan fungsi DP3APPKB diarahkan untuk mewujudkan pembangunan manusia yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan kependudukan.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi Kota Salatiga, DP3APPKB menetapkan sasaran strategis yang berorientasi pada meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender, terpenuhinya hak dan perlindungan anak, terkendalinya pertumbuhan penduduk, serta meningkatnya kualitas keluarga melalui program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Capaian sasaran tersebut diukur melalui indikator kinerja utama dan indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja.

Selama Tahun 2025, pelaksanaan program dan kegiatan DP3APPKB masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain belum optimalnya partisipasi pemangku kepentingan dalam pengarusutamaan gender dan perlindungan anak, keterbatasan kualitas dan ketersediaan data terpilah gender dan anak, serta dinamika sosial yang memengaruhi pelaksanaan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan kebutuhan penguatan kelembagaan turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut, antara lain melalui penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan sistem data dan informasi, serta optimalisasi pelaksanaan program pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana. Pelaksanaan program prioritas didukung oleh Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Secara umum, capaian kinerja DP3APPKB Kota Salatiga Tahun 2025 menunjukkan hasil yang positif dan mengalami perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hasil pengukuran kinerja ini menjadi dasar bagi DP3APPKB untuk melakukan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan serta perencanaan kinerja pada tahun berikutnya, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi dapat semakin efektif dalam mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Salatiga,

2026

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PELINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KOTA SALATIGA



SUPARLI, S.K.M., M.Kes

Pembina TK.I

NIP. 197306161999031007

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan akuntabel merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam rangka mendukung hal tersebut, setiap perangkat daerah diwajibkan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan sumber daya publik, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) merupakan perangkat daerah yang mengemban urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana, yang secara substansial berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Pada Tahun 2025, pelaksanaan program dan kegiatan DP3APPKB mengacu pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga, khususnya pada sasaran pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing, inklusif, dan berkeadilan.

LKjIP DP3APPKB Tahun 2025 disusun sebagai media evaluasi atas capaian kinerja yang telah dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2025, dengan mengacu pada keselarasan antara perencanaan strategis, perencanaan tahunan, dan perjanjian kinerja perangkat daerah. Evaluasi kinerja difokuskan pada pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama (IKU) DP3APPKB yang diturunkan dari sasaran dan indikator kinerja daerah dalam RPJMD/RPD, serta keterkaitannya dengan target kinerja pembangunan daerah.

Dalam konteks isu strategis Tahun 2025, DP3APPKB dihadapkan pada sejumlah tantangan, antara lain masih perlunya penguatan pengarusutamaan gender dan perencanaan responsif gender (PUG dan PPRG), peningkatan

kualitas perlindungan dan pemenuhan hak anak, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, pengendalian laju pertumbuhan penduduk, peningkatan kualitas dan ketahanan keluarga, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam program keluarga berencana, termasuk penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Selain itu, tantangan kualitas data, integrasi sistem informasi, serta efektivitas koordinasi lintas sektor juga menjadi isu penting yang memengaruhi capaian kinerja perangkat daerah.

Penyusunan LKjIP DP3APPKB Tahun 2025 tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada kepala daerah dan masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen untuk menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan dalam menjawab isu-isu strategis pembangunan daerah. Melalui laporan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai tingkat pencapaian kinerja DP3APPKB, faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kendala pelaksanaan, serta menjadi dasar perumusan rekomendasi perbaikan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Dengan demikian, LKjIP DP3APPKB Tahun 2025 diharapkan mampu mendukung penguatan implementasi SAKIP secara berkelanjutan serta mendorong terwujudnya pembangunan daerah yang berkeadilan gender, ramah anak, berwawasan kependudukan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas keluarga sesuai arah kebijakan pembangunan Kota Salatiga.

## **B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 12 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Selain menjalankan tugas sebagaimana diatas, Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana juga menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas lingkup tugasnya.

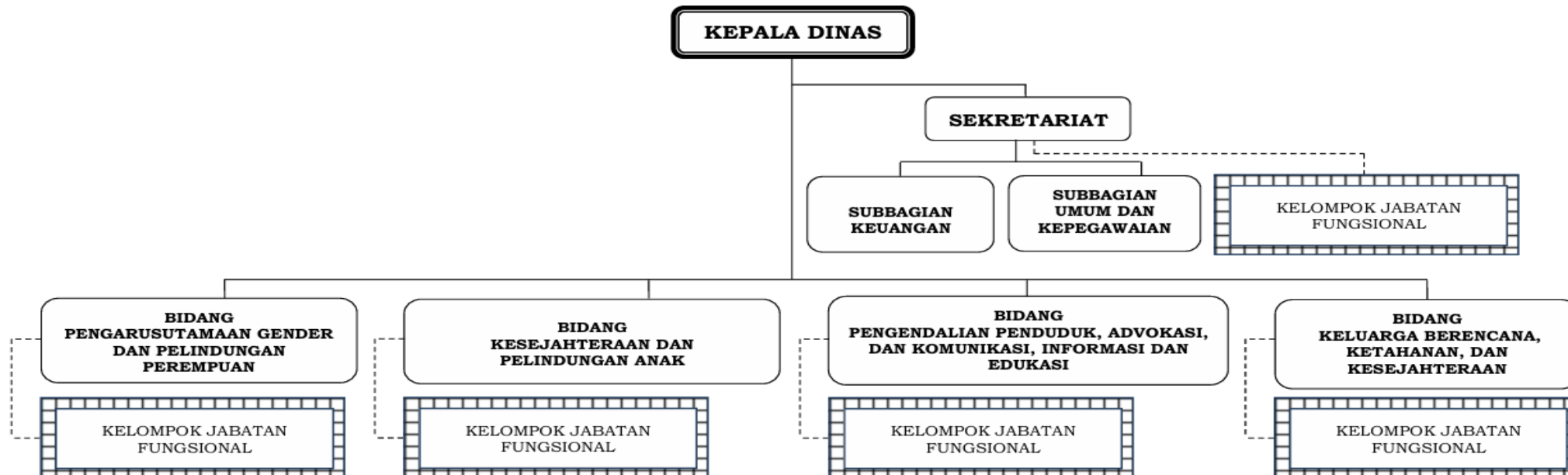
Berdasarkan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 12 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri atas:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri atas :
  - a. Sub Bagian Keuangan;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Perempuan, yang membawahi :
  - a. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, yang membawahi :
  - a. Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi, yang membawahi :
  - a. Kelompok Jabatan Fungsional
6. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, yang membawahi :
  - a. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun bagan susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALI KOTA SALATIGA  
NOMOR 12 TAHUN 2024  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN, PELINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PELINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



Pj. WALI KOTA SALATIGA,  
ttd.  
YASIP KHASANI

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

## B. SUMBER DAYA DP3APPKB KOTA SALATIGA

Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga didukung oleh sumber daya aparatur yang terdistribusi menurut bidang dan kesekretariatan. Pada Tahun 2025, jumlah pegawai sebanyak empat puluh enam (46) orang yang terdiri dari 32 PNS, 1 PPPK dan 13 PPPK Paruh Waktu sebagaimana berikut ini menurut jenis pengelompokannya :

### 1. Kualifikasi Pendidikan

Kualifikasi Pendidikan											Jumlah
	SMP		SMA/ sederajat		Diploma 3		Sarjana (S1)/D4		Pasca Sarjana (S-2)		
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
ASN	-		-	2	3	1	6	12	2	6	32
PPPK	-		-		-	1	-		-		1
PPPK -PW	1		6	1	-	-	3	1	-	1	13
JUMLAH	1	0	6	3	3	2	9	13	2	7	46

Sumber : DP3APPKB Kota Salatiga, Desember 2025

Berdasarkan data tersebut diatas, struktur pegawai di lingkungan DP3APPKB Kota Salatiga cukup baik, karena sebagian besar berpendidikan S1 sebanyak 22 orang, tingkat pendidikan S-2 sebanyak 9 orang, D-3 sebanyak 5 orang, SMA sebanyak 9 orang dan 1 orang lulusan SMP . Data tersebut menunjukkan pegawai perempuan dengan pendidikan S-1 dan S-2 lebih banyak dibanding jumlah pegawai laki-laki lulusan S-1 maupun S-2.

### 2. Pangkat dan Golongan Ruang

Ditinjau dari tingkat golongan, distribusi pegawai berada antara golongan II sampai dengan IV dengan proporsi golongan terbesar berada pada golongan III. Secara keseluruhan proporsi golongan pegawai dijabarkan pada tabel berikut.

**Jumlah PNS DP3APPKB Kota Salatiga  
Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2025**

No	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Golongan IV	2	5	7
2	Golongan III	8	14	22
3	Golongan II	2	1	3
4	Golongan I	0	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>12</b>	<b>20</b>	<b>32</b>

*Sumber: DP3APPKB Kota Salatiga, Desember 2025*

Data tersebut menunjukkan aksesibilitas pegawai perempuan dalam mencapai golongan III melebihi pegawai laki-laki. Tabel tersebut signifikan dengan pendidikan yang ditempuh perempuan dibandingkan laki-laki.

3. Jenis Jabatan dan Sebaran

**Sebaran PNS DP3APPKB Kota Salatiga  
Berdasarkan Golongan dan Jabatan Tahun 2025**

No	Jabatan	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	1
2	Sekretaris	1	-	-	-	1
3	Kabid Pengarusutamaan Gender dan Pelindungan Perempuan	1	-	-	-	1
4	Kabid Kesejahteraan dan Pelindungan Anak	1	-	-	-	1
5	Kabid Pengendalian Penduduk, Advokasi, dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi	-	1	-	-	1
6	Kabid Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1	-	-	-	1
7	Kasubag Keuangan	-	1	-	-	1
8	Kasubag Umum dan Kepegawaian	-	1	-	-	1
9	Penata kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda	-	2	-	-	2
10	Analisis Kebijakan Ahli Muda	-	1	-	-	1
11	Perencana Ahli Muda	1	-	-	-	1
12	Pranata Komputer Ahli Pertama	-	2	-	-	2
13	Pranata Komputer Mahir	-	1	-	-	1
14	Staf Sekretariat	1	3	1	-	5
15	Staf Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pelindungan Perempuan	-	3	1	-	4

No	Jabatan	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
16	Staf Bidang Kesejahteraan dan Pelindungan Anak	-	2	-	-	2
17	Staf Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	3	-	-	3
18	Staf Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	2	1	-	3
	<b>Jumlah</b>	<b>7</b>	<b>22</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>32</b>

Sumber : DP3APPKB Kota Salatiga, Desember 2025

Tabel diatas menunjukkan bahwa kecenderungan pemilik golongan IV adalah para pemegang jabatan struktural dari pimpinan Dinas hingga minimal Kepala Bidang.

### C. SUMBER DAYA ASET

Sumber daya aset prasarana dan sarana yang dimiliki oleh DP3APPKB Kota Salatiga adalah sebagai berikut.

#### Data Aset DP3APPKB Kota Salatiga Tahun 2025

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Kondisi
1	Tanah	M <sup>2</sup>	2.665 M <sup>2</sup>	Baik
2	Mobil	Unit	10	Baik
3	Sepeda motor	Unit	34	Baik
4	Kendaraan Bermotor Khusus	Unit	2	Baik
5	Almari/Rak/Filling cabinet	Unit	58	Baik
6	CCTV	Paket	3	Baik
7	Papan Visual	Unit	2	Baik
8	White Board	Unit	9	Baik
9	Alat Penghancur Kertas	Unit	10	Baik
10	Mesin Absensi	Unit	2	1 Baik; 1 Rusak
11	Focusing Screen	Unit	10	Baik
12	LCD	Unit	10	Baik
13	Voice Pen	Unit	3	Baik

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Kondisi
14	UPS	Unit	9	Baik
15	Meja Kerja	Unit	40	Baik
16	Kursi Rapat	Unit	260	Baik
17	Kursi Tamu	Unit	2	Baik
18	Kursi Putar	Unit	19	Baik
19	Kursi Lipat	Unit	127	Baik
20	Meja Komputer	Unit	8	Baik
21	Sofa	Unit	6	Baik
22	Vacum Cleaner	Unit	1	Baik
23	Lemari Es	Unit	1	Sedang
24	AC	Unit	29	Baik
25	Kipas Angin	Unit	13	Baik
26	Exhause Fan	Unit	25	Baik
27	TV	Unit	1	Baik
28	Loudspeaker	Unit	8	Baik
29	Sound	Unit	1	Baik;
30	Smart TV	Unit	1	Baik
31	Alat Pemadam Kebakaran	Unit	3	Baik
32	Wireless	Unit	8	Baik
33	Meja Kerja Pejabat	Unit	32	Baik
34	Kursi Pejabat	Unit	41	Baik
35	Camera	Unit	4	Baik
36	Faksimile	Unit	2	Baik
37	Telepon	Unit	3	Baik
38	Genset	Unit	1	Baik
39	Alat Kedokteran KB	Paket	1	Baik
40	Alat Kesehatan Kebidanan	Unit	4	Baik
41	Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin	Unit	4	Baik
42	Thermometer Digital	Unit	7	Baik
43	Personal Computer	Unit	40	Baik
44	Laptop	Unit	15	Baik

Sumber : DP3APPKB Kota Salatiga, 2025

#### D. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*)

Permasalahan pembangunan di Kota Salatiga ditunjukkan dengan kondisi permasalahan pada masing-masing urusan pembangunan. Sementara itu isu strategis merupakan rumusan dari berbagai permasalahan yang perlu ditangani melalui berbagai strategi dan kebijakan. DP3APPKB Kota Salatiga berkedudukan sebagai unsur penunjang yang membidangi Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai permasalahan diantaranya sebagai berikut:

1. Permasalahan terkait kesekretariatan:
  - Penggunaan teknologi guna pelayanan informasi publik belum merata
  - Terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah
2. Permasalahan terkait Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
  - Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)
3. Permasalahan terkait Advokasi, Penggerakan dan Pendayagunaan PLKB
  - Masih kurang optimalnya petugas dalam memberikan KIE dan pelayanan KB, karena keterbatasan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana dan petugas pemberi pelayanan KB
  - Belum meratanya pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pada Pasangan Usia Subur (PUS), Kader maupun Masyarakat
4. Permasalahan terkait pelayanan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang
  - Masih banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS) menggunakan alat kontrasepsi tradisional seperti: kalender, senggama terputus dan metode anorexia laktasi
5. Permasalahan terkait Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
  - Belum optimalnya pengembangan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Kelompok Akseptor (UPPKA) terutama dalam pemasaran hasil produk
  - Belum optimalnya pengembangan kegiatan Tribina dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK-R/M)
6. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender

- Belum optimalnya sosialisasi dan edukasi terhadap perempuan Kota Salatiga dalam hal pendidikan berpolitik. Pada tahun 2025 anggota legislatif perempuan berjumlah 2 orang atau sebesar 8% dari total jumlah anggota legislatif sebanyak 25 orang, belum bisa memenuhi standar kuota peran perempuan dalam legislatif yaitu sebesar 30%.
7. Permasalahan terkait perlindungan perempuan dan anak
    - masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan, pada tahun 2025 terdapat 30 kasus kekerasan terhadap perempuan
    - masih adanya kasus kekerasan terhadap anak, pada tahun 202 terdapat 57 kasus kekerasan terhadap anak
  8. Permasalahan terkait pemenuhan hak anak
    - Belum optimalnya tingkat capaian skor Kota Layak Anak, pada tahun 2025 Kota Layak Anak Kota Salatiga masih berada di kategori nindya dengan nilai 682,21.

**BAB II**  
**PERENCANAAN KINERJA**

**A. VISI**

Visi Kota Salatiga adalah: ***“Salatiga Yang Maju, Demokratis dan Nyaman”***

Visi tersebut di atas mengamanahkan kepada Pemerintah Kota Salatiga, masyarakat, swasta dan segenap pemangku kepentingan yang bersatu dalam keberagaman suku, budaya dan agama untuk mewujudkan Kota Salatiga menjadi Kota yang Maju, Demokratis dan Nyaman. Adapun makna visi tersebut adalah :

**Penjelasan Makna Visi  
Salatiga Yang Maju, Demokratis dan Nyaman**

<b>Unsur Visi</b>	<b>Penjelasan</b>
<b>Maju</b>	bermakna bahwa Kota Salatiga sebagai kota yang semakin mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif serta didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang semakin baik. Kemajuan tersebut dapat diukur dari beberapa indikator. Pertama, kemajuan masyarakat Kota Salatiga diukur dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan perkapita dan pemerataan distribusinya, berkembangnya sektor jasa perdagangan dan industri, iklim usaha dan penanaman modal yang semakin kondusif, produktif dan berkembang, dengan memperhatikan potensi lokal, sumber daya manusia lebih berkualitas dan produktif, tingkat pendidikan masyarakat lebih baik, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin tinggi dan mampu mengadaptasi perkembangan global, kesempatan memperoleh pendidikan yang semakin merata, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil, meningkatnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan, masyarakat Kota Salatiga mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan pembangunan yang dibutuhkan

Unsur Visi	Penjelasan
	<p>masyarakat, mempunyai semangat dan lebih mampu menghadapi tantangan, serta dapat diukur dari peningkatan kemampuan dan kekuatan untuk melaksanakan pembangunan, peningkatan kemampuan keuangan daerah, ketergantungan dari pihak lain secara bertahap semakin berkurang, peran serta masyarakat yang semakin meningkat dalam proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah, ketersediaan SDM pemerintahan yang semakin berkualitas, tata kelola pemerintahan yang lebih baik, terjalinnya kerjasama regional dan internasional yang lebih baik, kehidupan masyarakat baik sosial, politik, yang lebih bermoral, beretika, dan berbudaya</p>
<b>Demokratis</b>	<p>bermakna bahwa Kota Salatiga melaksanakan demokrasi berlandaskan hukum, etika, moral, kesantunan, memperkuat kelembagaan politik, kelembagaan masyarakat sipil, peran serta masyarakat, menjunjung tinggi hak dan kewajiban pihak lain, memperkuat kualitas pelaksanaan otonomi daerah dan mengedepankan supremasi hukum dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban.</p>
<b>Nyaman</b>	<p>bermakna bahwa terciptanya suasana dan kondisi kehidupan masyarakat Kota Salatiga yang sehat, tertib, bersih indah dan aman. Warga Kota Salatiga merupakan insan yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan YME menurut agama dan keimanan masing-masing dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Adanya kondisi yang harmonis, senantiasa memperhatikan keseimbangan material maupun spiritual sehingga terjalin hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara segenap pemangku kepentingan, dengan memperhatikan kondisi lingkungan, fasilitas dan utilitas kota yang semakin baik, hasil-hasil pembangunan</p>

Unsur Visi	Penjelasan
	yang lebih merata dan berwawasan lingkungan, serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sumber daya alam dan melestarikan fungsi lingkungan hidup.

## B. MISI

Guna mewujudkan visi maka disusun misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan . Untuk mencapai visi Kota Salatiga Yang Maju, Demokratis dan Nyaman ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan SDM yang berkualitas melalui peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakat
2. Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik diarahkan pada aparatur yang semakin berkualitas, profesional, bersih dan bermartabat, serta semakin meningkatnya peran dan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat didukung oleh infrastruktur dan teknologi maju
4. Mewujudkan demokrasi yang berdasarkan hukum, bermartabat, bertanggungjawab dan berkeadilan
5. Mewujudkan penataan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
6. Mewujudkan fasilitas dan utilitas kota.

Misi yang diemban DP3APPKB adalah **Misi 1. Mewujudkan SDM yang berkualitas melalui peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mengadaptasi perkembangan global dengan tetap berlandaskan pada norma dan nilai-nilai luhur masyarakat.**

## C. TUJUAN dan SASARAN

Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis. Tujuan yang

dijabarkan dalam hal ini yaitu tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023-2026.

Sementara itu, yang dimaksud dengan sasaran yaitu kondisi yang menggambarkan hal ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran yang dijabarkan dalam hal ini yaitu sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2023-2026. Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran Perangkat Daerah disajikan pada Tabel di bawah ini.

Tujuan, Sasaran Pelayanan DP3APPKB Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tahunan				Target Akhir Renstra 2026
					2023	2024	2025	2026	
Meningkatkan perlindungan, pemenuhan hak-hak anak, dan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender`	Score capaian KLA	Meningkatnya cakupan hak-hak anak, kesetaraan dan keberdayaan perempuan		Nilai	615	620	625	630	630
			Persentase kelembagaan forum anak tingkat kota, kecamatan dan kelurahan	%	28,57	32,14	35,71	39,29	39,29
			Persentase Perempuan dan anak korban kekerasan yang tertangani	%	100	100	100	100	100
			%	24	24	24	24	24	
	IDG		Nilai	80	80,5	81	81,5	81,5	
	IPG		Nilai	95	95,5	96	96,5	96,5	
			%	40	40	41	41	41	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tahunan				Target Akhir Renstra 2026
					2023	2024	2025	2026	
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengendalian pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk			%	1,34	1,32	1,30	1,30	1,30
		Mengendalikan pertumbuhan penduduk	TFR (Total Fertility Rate)	%	2,40	2,30	2,20	2,10	2,10

#### D. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Program dan Kegiatan yang akan dijabarkan dalam Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga Tahun 2025 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga tahun 2023-2026 yang disusun secara strategis dengan memperhatikan visi, misi dan perubahan kondisi strategis lingkup organisasi Pemerintah Kota Salatiga.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga Tahun 2025 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Wali Kota Salatiga untuk mewujudkan target kinerja sesuai

lampiran perjanjian ini. Disamping itu Perjanjian Kinerja ini juga dibuat untuk jajaran eselon III di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga. Adapun perjanjian kinerja eselon II dengan Wali Kota dapat dilihat pada tabel berikut dengan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengendalian pertumbuhan penduduk  Meningkatkan perlindungan, pemenuhan hak-hak anak, dan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,30%
		TFR (Total Fertility Rate)	2,2%
		Capaian Kota Layak Anak (KLA)	625 score
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	96 score
2.	Meningkatnya Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	81 score
3.	Terkendalinya Jumlah Penduduk	Persentase kelembagaan forum anak tingkat kota, kecamatan dan kelurahan	100%
4.	Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang tertangani	100%
		Sumbangan Perempuan dalam pendapatan kerja	41%

Dalam rangka mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga Tahun 2025 telah melaksanakan 9 program 27 kegiatan 61 sub kegiatan yang didukung dengan anggaran sebesar Rp11.855.187.678,00 yang bersumber dana dari DAKNF untuk BOKB sebesar Rp2.449.000.000,00, DAKNF untuk PPPA sebesar Rp400.660.000,00; dan DAU sebesar Rp9.005.527.678,00.

Gambaran mengenai keterkaitan antara sasaran dan target kinerja yang telah disepakati antara Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga dengan Eselon III Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS (SS)/ SASARAN PROGRAM (SP)	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Urusan Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak</b>					
	SS:Meningkatnya cakupan hak-hak anak, kesetaraan dan keberdayaan perempuan		Prosentase kelembagaan forum anak tingkat kota, kecamatan dan kelurahan	100%	
			Prosentase Perempuan dan anak korban kekerasan yang tertangani	100%	
			Persentase perempuan yang menjadi anggota legislatif	24%	
			Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja	41%	
1.	SP:Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	3,8%	<b>170.111.800</b>
			Persentase Kelembagaan PUG aktif	100%	
			Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	100%	
			Persentase perempuan yang menjadi anggota legislative	24%	
2	SP:Meningkatnya Perlindungan Perempuan	Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan	100%	<b>248.691.000</b>

NO	SASARAN STRATEGIS (SS)/ SASARAN PROGRAM (SP)	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu		
			Rasio Kekerasan terhadap perempuan	14,13%	
3	SP:Meningkatnya kualitas keluarga	Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase PKK aktif	100%	518.138.000
4	SP:Meningkatnya cakupan pemenuhan hak-hak anak	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase anak yang terlibat dalam kegiatan anak	64,06%	228.452.500
5	SP:Meningkatnya perlindungan khusus anak	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan	0,02%	339.199.000
<b>Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>					
	SS:Mengendalikan pertumbuhan penduduk		TFR (Total Fertility Rate)	2,2%	
	SP:Meningkatnya pengendalian laju pertumbuhan penduduk	Program Pengendalian Penduduk	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1000 perempuan usia subur/ 15-49 tahun (ASFR)	1,75%	556.672.000
			Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan	100%	

NO	SASARAN STRATEGIS (SS)/ SASARAN PROGRAM (SP)	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Cakupan PUS yang istrinya di bawah 20 tahun	2%	
			Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	22,1 tahun	
			Cakupan Pembinaan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (penyusunan Grand Design, Profil/Parameter dan Proyeksi Penduduk)	90%	
7	SP:Meningkatnya pembinaan keluarga berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rasio Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)	1:2	<b>1.673.905.411</b>
			Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmetneed)	12%	
			Rasio akseptor KB baru	73%	
			Cakupan peserta KB aktif	84%	
			Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	78,3%	
			Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	27,57%	

NO	SASARAN STRATEGIS (SS)/ SASARAN PROGRAM (SP)	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Persentase Fasilitas Kesehatan yang siap melayani KB MKJP	90%	
			Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	75%	
8	SP:Meningkatnya pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)	1:2	<b>1.268.051.000</b>
			Cakupan Balita/ Anak dengan Tumbuh Kembang sesuai dengan Kartu Kembang Anak (KKA)	90%	
			Cakupan Perkawinan Usia di Bawah 21 tahun	1,7%	
			Cakupan Kader BKB yang Terlatih	87%	
			Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB	82%	
			Persentase Baduta Stunting	22%	
<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>					

NO	SASARAN STRATEGIS (SS)/ SASARAN PROGRAM (SP)	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	Terpenuhinya administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	89%	<b>6.851.966.967</b>

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2025

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga adalah perwujudan DP3APPKB Kota Salatiga untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2025. Kinerja DP3APPKB Kota Salatiga Tahun 2025 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Pada bab ini akan disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/ kendala dan Langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/ kendala dan permasalahan.

Dalam pencapaian misi RPD Kota Salatiga Tahun 2023–2026 telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang diperjanjikan antara Wali Kota dengan Kepala DP3APPKB. Adapun pencapaian tujuan adalah sebagai berikut:

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	TAHUN 2025			TAHUN 2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA 2026
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (6)-(8)	(10)	(11)
1	Meningkatkan perlindungan, pemenuhan hak-hak anak, dan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender`	Score capaian KLA	Nilai	625	682,21	109,15%	682,21	0,00	630	108,29%
		IDG	Nilai	81	65,05	80,31%	65,05	0,00	81,5	79,82%
		IPG	Nilai	96	95,59	99,57%	95,59	0,00	96,5	99,06%
2	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengendalian pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,3	1,13	86,92%	1,24	-0,11	1,3	86,92%

## 1. Capaian Kinerja

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) DP3APPKB Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang bervariasi antar indikator. Pada indikator **Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)**, realisasi daerah sebesar **1,13%** kurang dari dibandingkan target **1,3%** secara substansial realisasi dalam angka yang baik, di mana keadaan ideal berada antara 1-2%. Untuk Kota Salatiga sendiri terhitung indikator positif dikarenakan realisasi LPP di Kota Salatiga berada pada tren di bawah 2%. Namun demikian, capaian LPP daerah masih **lebih tinggi** dibandingkan capaian **nasional (1,09% pada 2025)** dan **Provinsi Jawa Tengah (0,97% pada 2025)**, yang mengindikasikan bahwa laju pertumbuhan penduduk di daerah masih relatif lebih cepat dibandingkan rata-rata nasional dan provinsi. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan lanjutan pada program pengendalian penduduk, perluasan akses layanan KB, serta peningkatan partisipasi KB pria.

Pada indikator **Score Capaian KLA**, capaian daerah mencapai **109,15%** dari target Renstra, namun realisasi tersebut masih menggunakan **data penilaian Tahun 2024** karena pada Tahun 2025 tidak dilakukan penilaian KLA. Oleh karena itu, capaian ini belum sepenuhnya mencerminkan kondisi faktual Tahun 2025.

Sementara itu, pada indikator **IDG** dan **IPG**, capaian daerah masing-masing sebesar **65,05** (80,31% dari target) dan **95,59** (99,57% dari target), yang juga masih menggunakan data Tahun 2024 karena keterbatasan rilis data BPS Tahun 2025. Dibandingkan dengan capaian **nasional** (IDG 77,62; IPG 91,85) dan **Provinsi Jawa Tengah** (IDG 72,58; IPG 93), capaian daerah relatif **lebih rendah pada indikator IDG** yang menunjukkan masih lemahnya pemberdayaan perempuan dalam aspek partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan. Sebaliknya, pada indikator **IPG**, capaian daerah relatif **lebih baik** dibandingkan capaian nasional dan provinsi, yang mengindikasikan kesenjangan pembangunan gender di daerah relatif lebih kecil. Secara keseluruhan, hasil ini menegaskan perlunya penguatan kebijakan afirmatif dan program pemberdayaan perempuan untuk mengejar ketertinggalan pada IDG, sekaligus mempertahankan kinerja positif pada IPG, KLA, dan pengendalian pertumbuhan penduduk.

## 2. Analisa Keberhasilan/Kegagalan dan Alternatif Solusi

Indikator Tujuan	Status Pencapaian 2025	Faktor Keberhasilan/Kegagalan	Tindak Lanjut/Alternatif Solusi
Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Tercapai (substansial) – Realisasi 1,13% < Target 1,3%	<b>Berhasil:</b> Penguatan layanan KB, KIE kependudukan, dukungan PLKB & faskes. Catatan: LPP daerah masih di atas nasional & provinsi.	Perluasan layanan KB jemput bola; advokasi KB pria; integrasi pengendalian penduduk dengan program KIA & stunting; penajaman sasaran berbasis data keluarga.
Score Capaian KLA	Melampaui target (109,15%)	<b>Berhasil:</b> Koordinasi lintas sektor, pemenuhan dokumen & indikator KLA, aktivasi Gugus Tugas & Forum Anak. Catatan: Data pakai penilaian 2024 (2025 tidak ada penilaian).	Menjaga keberlanjutan praktik baik; fokus pada dampak layanan ramah anak (bukan administratif); replikasi inovasi di kelurahan/sekolah; penguatan monitoring berbasis outcome.
IDG	Belum tercapai (80,31%)	<b>Kendala:</b> Partisipasi perempuan dalam ekonomi & pengambilan keputusan masih rendah; akses sumber daya produktif terbatas; faktor sosial budaya; intervensi lintas sektor belum kuat.	Penguatan pemberdayaan ekonomi perempuan (UMKM, akses permodalan); pelatihan kepemimpinan perempuan; afirmasi kebijakan keterwakilan perempuan; penguatan PUG & PPRG lintas OPD.
IPG	Hampir tercapai (99,57%)	<b>Relatif berhasil:</b> Akses pendidikan & kesehatan perempuan cukup baik. Kendala kecil: Kesenjangan ekonomi & kualitas pekerjaan.	Integrasi IPG dengan program ketenagakerjaan & perlindungan sosial; penguatan peningkatan keterampilan kerja perempuan; monitoring indikator turunan IPG secara periodik.

### 3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pagu Anggaran DP3APPKB Tahun 2025 sebesar Rp 11.855.187.678 dengan realisasi sebesar Rp 10.848.380.252. Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan DP3APPKB menunjukkan tingkat serapan anggaran yang relatif efisien dengan realisasi total 91,51% dari pagu, sementara sebagian besar indikator kinerja utama (IKU) mencapai atau melampaui target (Score KLA 109,15%; IPG 99,57%; Laju Pertumbuhan Penduduk terkendali 92,31% terhadap target— indikator negatif). Capaian kinerja yang tinggi dengan serapan anggaran tidak penuh mengindikasikan adanya efisiensi alokasi dan pelaksanaan anggaran, terutama pada Program Penunjang (serapan  $\pm 91,77\%$ ) serta program PUG & Pemberdayaan Perempuan ( $\pm 95,99\%$ ) dan PHA ( $\pm 99,70\%$ ), yang berhasil menghasilkan output sesuai target dengan biaya relatif optimal. Hal ini didukung oleh pemanfaatan jejaring lintas sektor, optimalisasi peran kader, serta pola pelaksanaan kegiatan yang terintegrasi (rakor, advokasi, KIE) sehingga mengurangi biaya duplikasi.

Namun demikian, masih terdapat ketidakseimbangan efisiensi pada beberapa kegiatan layanan rujukan perlindungan perempuan dan distribusi alat/obat kontrasepsi, yang menunjukkan serapan rendah (sebagian di bawah 70%) meskipun target output tercapai. Kondisi ini mengindikasikan perencanaan anggaran yang belum sepenuhnya presisi terhadap kebutuhan riil (overbudget pada komponen tertentu) serta adanya kendala operasional (keterbatasan kasus rujukan, perubahan kebutuhan lapangan, dan penyesuaian harga/satuan biaya). Ke depan, peningkatan efisiensi diarahkan melalui penajaman perencanaan berbasis beban kerja dan proyeksi kebutuhan riil, penguatan penganggaran berbasis kinerja (value for money), realokasi anggaran pada komponen berdaya ungkit tinggi (misalnya peningkatan MKJP, pendampingan keluarga berisiko stunting, dan KIE berbasis komunitas), serta penguatan monitoring triwulanan untuk koreksi dini deviasi serapan dan kinerja.

### 4. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam mencapai target kinerja antara lain yaitu:

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
3. Perlindungan Perempuan

4. Peningkatan Kualitas Keluarga
5. Pemenuhan Hak Anak (PHA)
6. Perlindungan Khusus Anak
7. Pengendalian Penduduk
8. Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
9. Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Kinerja DP3APPKB Kota Salatiga terbagi menjadi 2 (dua) urusan dengan masing-masing capain sebagai berikut :

**1. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak**

Sasaran : Meningkatnya cakupan hak-hak anak, kesetaraan dan keberdayaan perempuan

**1. Capaian Kinerja**

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2025			TAHUN 2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA 2026
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Meningkatnya cakupan hak-hak anak, kesetaraan dan keberdayaan perempuan	Persentase kelembagaan forum anak tingkat kota, kecamatan dan kelurahan	%	100	100	100,00%	100	0,00	100	100,00%
		Persentase Perempuan dan anak korban kekerasan yang tertangani	%	100	100	100,00%	100	0,00	100	100,00%

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2025			TAHUN 2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA 2026
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Persentase perempuan yang menjadi anggota legislatif	%	24	8	33,33%	8	0,00	24	33,33%
		Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja	%	41	40,72	99,32%	40,72	0,00	41	99,32%

Secara umum, kinerja DP3APPKB pada sasaran strategis ini menunjukkan capaian yang baik, dengan mayoritas indikator telah mencapai target tahunan dan target akhir Renstra. Dari empat indikator sasaran yang diukur pada Tahun 2025, tiga indikator berada pada kategori tercapai/sangat tinggi, sedangkan satu indikator masih rendah dan memerlukan perhatian khusus.

a. Persentase kelembagaan Forum Anak tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan

Realisasi Tahun 2025 mencapai 100% sesuai dengan target yang ditetapkan, serta konsisten dengan capaian Tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan Forum Anak telah terjaga secara berkelanjutan. Capaian ini mengindikasikan efektivitas fasilitasi, pembinaan, dan komitmen lintas perangkat daerah dalam mendorong partisipasi anak di tingkat lokal. Dengan capaian yang telah memenuhi target akhir Renstra, indikator ini berada pada kategori kinerja sangat baik dan perlu dipertahankan melalui penguatan kualitas peran Forum Anak, tidak hanya pada aspek kuantitas kelembagaan. Tantangan ke depan bukan lagi pembentukan kelembagaan, melainkan peningkatan kualitas peran Forum Anak dalam perencanaan pembangunan (misalnya keterlibatan bermakna dalam Musrenbang).

b. Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang tertangani

Realisasi sebesar 100% menunjukkan seluruh kasus perempuan dan anak korban kekerasan yang dilaporkan telah mendapatkan layanan penanganan sesuai standar layanan. Capaian ini setara dengan target tahunan dan target akhir Renstra, serta konsisten dengan realisasi Tahun 2024. Kondisi ini mencerminkan berfungsinya mekanisme layanan perlindungan korban, termasuk layanan pengaduan, pendampingan, rujukan medis, psikososial, dan bantuan hukum. Ke depan, tantangan yang perlu diantisipasi adalah peningkatan kualitas layanan, keberlanjutan pendampingan korban, serta penguatan upaya pencegahan kekerasan berbasis keluarga dan komunitas.

c. Persentase perempuan yang menjadi anggota legislatif

Indikator ini menunjukkan capaian rendah, dengan realisasi 8% dari target 24% (capaian 33,33%), dan tidak mengalami perubahan dibandingkan Tahun 2024. Hanya terdapat 2 perempuan anggota legislatif dari 25 orang

anggota DPRD Kota Salatiga. Rendahnya capaian ini dipengaruhi oleh faktor struktural dan eksternal, antara lain:

- hasil proses politik dan pemilu yang berada di luar kendali langsung perangkat daerah;
- masih terbatasnya partisipasi politik perempuan serta tantangan budaya dan sosial;
- belum optimalnya kaderisasi dan penguatan kapasitas kepemimpinan perempuan secara berkelanjutan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun DP3APPKB berperan dalam advokasi dan pemberdayaan perempuan, indikator ini sangat dipengaruhi oleh dinamika politik elektoral. Oleh karena itu, diperlukan penguatan strategi non-struktural seperti pendidikan politik perempuan, penguatan jejaring organisasi perempuan, serta kolaborasi dengan partai politik dan lembaga penyelenggara pemilu untuk mendorong peningkatan keterwakilan perempuan pada periode pemilu berikutnya.

d. Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja

Realisasi Tahun 2025 sebesar 40,72% dari target 41%, dengan tingkat capaian 99,32%, serta relatif stagnan dibandingkan Tahun 2024. Capaian Kota Salatiga lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 37,31% dan Provinsi Jawa Tengah sebesar 35,43%. Capaian ini menunjukkan bahwa peran perempuan dalam aktivitas ekonomi dan kontribusi terhadap pendapatan kerja telah mendekati target yang ditetapkan. Kondisi ini mencerminkan dampak positif dari program pemberdayaan ekonomi perempuan, akses terhadap pelatihan keterampilan, serta peluang kerja bagi perempuan. Namun demikian, belum tercapainya target secara penuh mengindikasikan masih adanya hambatan seperti keterbatasan akses permodalan, beban ganda perempuan dalam keluarga, serta ketimpangan kesempatan kerja di sektor formal.

Dalam rangka melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak DP3APPKB melaksanakan program-program dengan indikator sebagai berikut:

SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2025			TAHUN 2024	KENAIKAN /PENURUNAN	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA 2026
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)= (6)-(8)	(10)	(11)
Meningkatnya cakupan hak-hak anak, kesetaraan dan keberdayaan perempuan	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	%	100	100	100,00%	100	0,00	100	100,00%
		Persentase perempuan yang menjadi anggota legislatif	%	24	8	33,33%	8	0,00	24	33,33%
		Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	3,8	6	157,89%	9,24	-3,24	3,9	236,92%
		Persentase Kelembagaan PUG aktif	%	100	100	100,00%	100	0,00	100	100,00%

SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2025			TAHUN 2024	KENAIKAN /PENURUNAN	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA 2026
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (6)-(8)	(10)	(11)
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100,00%	100	0	100	100,00%
		Rasio Kekerasan terhadap perempuan	%	14,13	6,31	223,93%	44,1	-37,79	13,12	207,92%
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase PKK aktif	%	100	100	100,00%	100	0,00	100	100,00%

SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2025			TAHUN 2024	KENAIKAN /PENURUNAN	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA 2026
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (6)-(8)	(10)	(11)
		Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	75	100	133%	25	75	100	100,00%
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Perangkat Daerah yg berkontribusi dalam sistem data gender dan anak	%	100	100	100,00%	100	0,00	100	100,00%
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase anak yang terlibat dalam kegiatan anak	%	64,06	85,56	134%	6,79	78,77	64,06	134%

SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2025			TAHUN 2024	KENAIKAN /PENURUNAN	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA 2026
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (6)-(8)	(10)	(11)
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan	%	0,02	0,11	-350%	0,06	0,05	0,02	-350%

Kinerja DP3APPKB pada Tahun 2025 menunjukkan capaian yang relatif baik pada indikator kelembagaan, tata kelola, dan layanan, namun masih menghadapi tantangan pada indikator perlindungan khusus anak, serta keterwakilan perempuan di ranah politik. Dibandingkan Tahun 2024, sebagian besar indikator bersifat stagnan pada level maksimal (100%), sementara beberapa indikator outcome menunjukkan perbaikan signifikan, khususnya penurunan rasio kekerasan terhadap perempuan.

Pada **Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**, seluruh Perangkat Daerah telah melaksanakan PPRG (100%) dan kelembagaan PUG aktif (100%). Capaian ini konsisten dengan Tahun 2024 dan telah memenuhi target akhir Renstra 2026. Hal ini menunjukkan bahwa pengarusutamaan gender telah terinstitusionalisasi dengan baik dalam tata kelola pemerintahan daerah. Persentase ARG pada belanja langsung APBD mencapai 6%, melampaui target tahun 2025 (3,8%) dan bahkan telah melampaui target akhir Renstra 2026 (3,9%). Meskipun terjadi penurunan dibandingkan Tahun 2024 (9,24%), secara substantif capaian 2025 tetap menunjukkan komitmen kuat terhadap penganggaran responsif gender, dengan catatan perlunya menjaga konsistensi alokasi dan meningkatkan kualitas pemanfaatan ARG agar benar-benar berdampak pada penurunan kesenjangan gender.

Sementara itu, persentase perempuan yang menjadi anggota legislatif tetap berada pada angka 8% dan tidak mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2024 dengan hanya 2 orang perempuan pada 25 DPRD Kota Salatiga. Capaian ini baru memenuhi 33,33% dari target akhir Renstra 2026 (24%). Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan representasi perempuan di lembaga legislatif masih menghadapi kendala struktural dan kultural, serta dipengaruhi oleh faktor di luar kewenangan langsung perangkat daerah. Diperlukan penguatan advokasi, literasi politik, dan fasilitasi kaderisasi kepemimpinan perempuan melalui kemitraan lintas sektor.

Pada **Program Perlindungan Perempuan**, cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih telah mencapai 100%, konsisten dengan Tahun 2024 dan target Renstra. Hal ini mencerminkan kesiapan sistem layanan perlindungan korban. Lebih lanjut, rasio kekerasan terhadap perempuan menunjukkan penurunan yang sangat signifikan

dari 44,1 pada Tahun 2024 menjadi 6,31 pada Tahun 2025, jauh melampaui target tahunan maupun target akhir Renstra 2026. Penurunan ini mengindikasikan adanya dampak positif dari upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan. Namun demikian, interpretasi capaian ini perlu mempertimbangkan kemungkinan dinamika pelaporan kasus, sehingga penguatan sistem pelaporan ramah korban dan pencegahan berbasis komunitas tetap menjadi prioritas.

Pada **Program Peningkatan Kualitas Keluarga**, persentase PKK aktif telah mencapai 100% dan stabil dibandingkan Tahun 2024, menunjukkan peran PKK yang konsisten sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam pembangunan keluarga. Serta untuk Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan telah terbentuk semua pada tahun 2025, sehingga capaiannya sebesar 133%, mengalami peningkatan dari tahun 2024 yang masih hanya terbentuk 1 di Kecamatan Sidomukti. Capaian tersebut juga telah memenuhi target untuk akhir Renstra sebesar 100%.

Pada **Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak**, seluruh Perangkat Daerah telah berkontribusi dalam sistem data gender dan anak (100%) dan konsisten dengan capaian Tahun 2024 serta target Renstra. Hal ini menunjukkan dukungan kelembagaan yang baik terhadap penguatan basis data. Tantangan ke depan terletak pada peningkatan kualitas, keterpaduan, dan pemanfaatan data sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan berbasis bukti.

Pada **Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**, persentase anak yang terlibat dalam kegiatan anak dapat mencapai 85,56% dari target 64,06%, dan mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan Tahun 2024 (6,79%). Capaian ini juga telah memenuhi target akhir Renstra 2026 sebesar 64,06%. Peningkatan yang cukup signifikan ini dipengaruhi oleh tersedianya data yang lebih baik. Di mana datanya didapatkan dari pengadministrasian kegiatan dari anak-anak yang lebih baik dan lebih lengkap. Hal ini tidak terlepas dari bimbingan dan pendampingan yang telah dilakukan OPD kepada anak-anak khususnya pada Forum Anak yang dari tahun ke tahun semakin bisa berkreasi untuk lebih baik.

Pada **Program Perlindungan Khusus Anak**, persentase anak korban kekerasan berada pada angka 0,11% dan belum mencapai target penurunan (0,02%), serta mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2024. Capaian terhadap target

akhir Renstra 2026 juga mengalami penurunan. Jika kita melihat capaian secara mentah maka capaian tersebut merupakan capaian yang sangat kurang di mana OPD belum mampu maksimal dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak. Akan tetapi hal itu juga dapat berarti bahwa upaya KIE yang telah dilakukan oleh OPD sudah berhasil yang ditandai dengan semakin banyaknya korban kekerasan yang lebih berani untuk melapor. Di samping itu juga dalam pelayanan penanganan kasus kekerasan sudah sangat maksimal yang ditandai dengan semua pelaporan kasus kekerasan sudah dan dapat tertangani secara maksimal.

## 2. Analisa Keberhasilan/Kegagalan dan Alternatif Solusi

### Analisis Keberhasilan Kinerja

#### a. Keberhasilan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Tata Kelola Kelembagaan

Pelaksanaan PPRG oleh seluruh Perangkat Daerah telah mencapai 100% dan kelembagaan PUG aktif di seluruh perangkat daerah. Capaian ini konsisten dengan Tahun 2024 serta telah memenuhi target akhir Renstra 2026. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pengarusutamaan gender telah terintegrasi secara kelembagaan dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah. Komitmen lintas perangkat daerah serta dukungan kebijakan internal menjadi faktor utama keberhasilan indikator ini.

#### b. Keberhasilan Penganggaran Responsif Gender (ARG)

Persentase ARG pada belanja langsung APBD Tahun 2025 mencapai 6%, melampaui target tahunan (3,8%) dan target akhir Renstra 2026 (3,9%). Meskipun mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2024, capaian ini tetap mencerminkan keberhasilan internalisasi perspektif gender dalam penganggaran daerah. Keberhasilan ini didukung oleh peningkatan pemahaman perangkat daerah terhadap konsep ARG serta pendampingan teknis dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.

#### c. Keberhasilan Layanan Perlindungan Korban Kekerasan

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih mencapai 100% dan konsisten dengan Tahun 2024. Hal ini menunjukkan keberhasilan sistem layanan terpadu, ketersediaan SDM terlatih, serta koordinasi lintas sektor (UPTD, kepolisian,

layanan kesehatan, dan lembaga pendamping). Keberhasilan ini berdampak pada meningkatnya kualitas layanan bagi korban.

d. Keberhasilan Penurunan Rasio Kekerasan terhadap Perempuan

Rasio kekerasan terhadap perempuan menurun signifikan dari 44,1 pada Tahun 2024 menjadi 6,31 pada Tahun 2025, jauh melampaui target tahunan dan target akhir Renstra 2026. Penurunan ini mengindikasikan keberhasilan program pencegahan, sosialisasi, dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Intervensi berbasis komunitas serta penguatan mekanisme perlindungan korban berkontribusi pada capaian outcome ini.

e. Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Keluarga dan Sistem Data

Persentase PKK aktif mencapai 100% dan kontribusi perangkat daerah dalam sistem data gender dan anak juga mencapai 100%. Keberhasilan ini menunjukkan konsistensi pembinaan kelembagaan masyarakat dan penguatan tata kelola data sebagai basis perencanaan pembangunan yang responsif gender dan anak. Ketersediaan data lintas sektor menjadi modal penting dalam perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

f. Keberhasilan Perluasan Layanan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)

Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan telah terbentuk semua pada tahun 2025, sehingga capaiannya sebesar 133%, mengalami peningkatan dari tahun 2024 yang masih hanya terbentuk 1 di Kecamatan Sidomukti. Capaian tersebut juga telah memenuhi target untuk akhir Renstra sebesar 100%. Keberhasilan ini sangat didukung dari Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) yang bertugas di Kota Salatiga, di mana mereka menjadi tumpuan untuk menjadi pengurus PPKS. Sehingga bisa memangkas biaya untuk PPKS.

g. Meningkatnya Partisipasi Anak dalam Kegiatan Anak

Persentase anak yang terlibat dalam kegiatan anak dapat mencapai 85,56% dari target 64,06%, dan mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan Tahun 2024 (6,79%). Capaian ini juga telah memenuhi target akhir Renstra 2026 sebesar 64,06%. Peningkatan yang cukup signifikan ini dipengaruhi oleh tersedianya data yang lebih baik. Di mana datanya didapatkan dari pengadministrasian kegiatan dari anak-anak yang lebih baik dan lebih lengkap. Hal ini tidak terlepas dari bimbingan dan pendampingan

yang telah dilakukan OPD kepada anak-anak khususnya pada Forum Anak yang dari tahun ke tahun semakin bisa berkreasi untuk lebih baik. Terlebih untuk Tahun 2025 Forum Anak mendapat fasilitasi kegiatan dari OPD yang lebih dari tahun sebelumnya sehingga bisa dimanfaatkan dengan lebih maksimal untuk melaksanakan beberapa kegiatan.

### **Analisis Kegagalan/Belum Optimalnya Kinerja**

- h. **Belum Optimalnya Representasi Perempuan di Lembaga Legislatif**  
Persentase perempuan yang menjadi anggota legislatif stagnan di angka 8% (tidak meningkat dari Tahun 2024) dan baru mencapai 33,33% dari target akhir Renstra 2026 (24%). Kinerja ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan representasi perempuan di ruang politik formal belum efektif. Faktor eksternal seperti dinamika politik elektoral, budaya politik, serta keterbatasan kaderisasi perempuan di partai politik menjadi penyebab utama yang berada di luar kendali langsung perangkat daerah.
- i. **Belum Tercapainya Target Penurunan Kekerasan terhadap Anak**  
Persentase anak korban kekerasan masih berada pada angka 0,11% dan menunjukkan penurunan dibandingkan Tahun 2024, serta belum mencapai target Renstra 2026 (0,02%). Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan kekerasan terhadap anak belum optimal. Faktor penyebab meliputi masih kuatnya pola pengasuhan yang kurang ramah anak, minimnya deteksi dini di lingkungan keluarga dan sekolah, serta belum meratanya intervensi pencegahan berbasis komunitas.

### **3. Alternatif Solusi**

Berdasarkan hasil analisis keberhasilan dan kegagalan kinerja Tahun 2025, dirumuskan alternatif solusi sebagai upaya perbaikan dan penguatan capaian kinerja DP3APPKB pada tahun berikutnya, sebagai berikut:

- a. **Peningkatan Representasi Perempuan di Lembaga Legislatif**

Permasalahan:

- Persentase perempuan di legislatif stagnan di angka 8% dan jauh dari target Renstra 2026 (24%).

Alternatif Solusi:

- Memperkuat advokasi kebijakan afirmasi keterwakilan perempuan kepada penyelenggara pemilu melalui forum koordinasi lintas sektor (Kesbangpol, KPU, Bawaslu, partai politik, organisasi perempuan).

- Mengembangkan program literasi politik perempuan, termasuk pelatihan kepemimpinan.
- Mendorong kaderisasi kepemimpinan perempuan sejak usia muda, bekerja sama dengan organisasi kepemudaan, kampus, dan komunitas perempuan.

b. Penguatan PPKS di Setiap Kecamatan

Permasalahan:

- Kelembagaan PPKS baru terbentuk di semua kecamatan pada tahun 2025.

Alternatif Solusi:

- Memberikan dukungan yang lebih maksimal untuk pelaksanaan PPKS di setiap Kecamatan, khususnya dari segi anggaran dan sarana prasarana.
- Melakukan KIE yang lebih, sehingga PPKS bisa diketahui masyarakat luas bahwa ada wadah untuk konseling untuk semua kalangan tanpa dipungut biaya.

c. Peningkatan Partisipasi Anak dalam Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Permasalahan:

- Partisipasi anak mengalami peningkatan yang signifikan dan dapat ditingkatkan lagi.

Alternatif Solusi:

- Mengembangkan model partisipasi anak yang lebih menarik dan relevan, seperti forum anak tematik, kegiatan kreatif digital, kampanye berbasis media sosial, dan lomba inovasi anak.
- Mengintegrasikan kegiatan PHA dengan ekstrakurikuler sekolah (OSIS, Pramuka, proyek kepemimpinan remaja).
- Mendorong peran sekolah dan guru BK sebagai mitra aktif dalam memfasilitasi keterlibatan anak.
- Memperluas wadah partisipasi anak di tingkat kelurahan melalui Forum Anak Kelurahan yang aktif dan difasilitasi secara rutin.
- Memberikan insentif non-finansial (sertifikat, penghargaan, publikasi praktik baik) bagi sekolah dan komunitas yang aktif melibatkan anak.

d. Penguatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak (Perlindungan Khusus Anak)

Permasalahan:

- Persentase anak korban kekerasan menurun di angka 0,11%, belum mencapai target Renstra.

Alternatif Solusi:

- Memperkuat intervensi preventif berbasis keluarga melalui program pengasuhan positif (parenting class), terutama bagi keluarga berisiko.
- Meningkatkan edukasi pencegahan kekerasan di satuan pendidikan, termasuk penguatan kebijakan sekolah ramah anak dan mekanisme pelaporan internal di sekolah.
- Mengoptimalkan peran PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) di tingkat RW/kelurahan sebagai garda terdepan deteksi dini.
- Mengembangkan mekanisme deteksi dini dan rujukan cepat kasus kekerasan anak berbasis komunitas (RT/RW, kader PKK, kader posyandu).
- Memperkuat kampanye publik perlindungan anak yang berkelanjutan, dengan pesan kunci tentang pengasuhan tanpa kekerasan dan pelaporan aman.

e. Penguatan Keberlanjutan ARG dan Dampaknya terhadap Outcome

Permasalahan:

- ARG menurun dibanding 2024 meskipun masih melampaui target Renstra.

Alternatif Solusi:

- Menetapkan standar minimal kualitas ARG, tidak hanya dari sisi persentase anggaran, tetapi juga keterkaitan langsung dengan isu kesenjangan gender dan anak.
- Memperkuat monitoring dampak ARG terhadap outcome (misalnya pengurangan kerentanan perempuan dan anak), bukan hanya pemenuhan administratif.
- Mendorong OPD untuk menyusun program berbasis analisis gender (Gender Analysis Pathway/GAP) secara lebih konsisten.

f. Penguatan Sistem Pelaporan dan Validitas Data Kekerasan

Permasalahan:

- Penurunan rasio kekerasan terhadap perempuan perlu diinterpretasikan hati-hati karena dipengaruhi dinamika pelaporan.

Alternatif Solusi:

- Memperluas akses pelaporan ramah korban (hotline, layanan daring, kanal aduan di kelurahan/sekolah).
- Memperkuat literasi masyarakat tentang pelaporan kekerasan agar korban dan saksi berani melapor.
- Mengintegrasikan data lintas sektor (UPTD PPA, kepolisian, fasilitas kesehatan, pendidikan) untuk meningkatkan akurasi dan kelengkapan data kasus.

#### 4. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan membandingkan antara realisasi anggaran terhadap pagu anggaran serta ketercapaian target indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan. Secara umum, DP3APPKB menunjukkan efisiensi yang baik karena sebagian besar target kinerja tercapai 100% dengan serapan anggaran di bawah 100%. Namun, terdapat beberapa catatan penting terkait ketidakseimbangan antara serapan anggaran dan capaian outcome pada beberapa program.

- a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan  
Anggaran sebesar Rp170.111.800 Realisasi sebesar Rp163.297.800 atau serapan anggaran 95,99%. Capaian kinerja:

- Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG: 100%
- Persentase perempuan yang menjadi anggota legislatif: 100%
- Persentase ARG pada belanja langsung APBD: 158%
- Persentase ARG pada belanja langsung APBD: 100%

Analisis efisiensi:

Program ini tergolong efisien dan efektif, karena seluruh indikator kinerja utama tercapai bahkan melampaui target (ARG 158%) dengan serapan anggaran di bawah pagu. Kegiatan koordinasi kebijakan PUG (99,15%) serta penguatan kapasitas lembaga layanan (94,93%) menunjukkan bahwa optimalisasi belanja dapat menghasilkan output dan outcome yang

maksimal. Hal ini mencerminkan perencanaan yang tepat sasaran serta pelaksanaan kegiatan yang fokus pada output strategis.

b. Program Perlindungan Perempuan

Anggaran sebesar Rp248.691.000 Realisasi sebesar Rp158.542.869 dengan serapan anggaran 63,75%. Capaian kinerja:

- Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu: 100%
- Rasio kekerasan terhadap perempuan: menurun signifikan (dari 14,13 menjadi 6,31)

Analisis efisiensi:

Program ini menunjukkan efisiensi tinggi dari sisi anggaran, karena target utama tercapai dengan serapan relatif rendah. Tahun 2025 terdapat 30 pelapor perempuan yang telah mendapatkan layanan sesuai dengan kebutuhan pelapor. Layanan yang diberikan berupa pemeriksaan kesehatan, pendampingan psikologis, rapat mediasi dan bantuan pemulihan spesifik korban. Tidak semua pelapor/korban membutuhkan semua layanan yang tersedia, layanan diberikan sesuai dengan kondisi/kebutuhan masing-masing korban. Secara kualitatif program ini dapat dikatakan efisien. Tidak ada hambatan dalam implementasi pemberian layanan terhadap perempuan korban kekerasan.

c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Anggaran sebesar Rp518.138.000 Realisasi sebesar 490.942.670 dengan serapan anggaran 94,75%. Capaian kinerja:

- PKK aktif: 100%
- Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan: 100%

Analisis efisiensi:

Program ini tergolong efisien dan proporsional, karena capaian indikator 100% dengan serapan anggaran yang relatif tinggi namun masih di bawah pagu. Hal ini menunjukkan bahwa belanja pembinaan kader PKK dan pengembangan kegiatan masyarakat memiliki korelasi langsung terhadap pencapaian output. Struktur belanja program relatif tepat guna dan tepat sasaran.

d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Anggaran Rp0 Realisasi Rp0 sehingga serapan anggaran: 0%. Capaian kinerja:

- Persentase Perangkat Daerah yg berkontribusi dalam sistem data gender dan anak: 100%
- Tersedianya dokumen data gender dan anak: 0%

Analisis efisiensi:

Efisiensi formal (serapan vs capaian indikator program):

Terlihat “efisien semu” karena indikator program tercapai 100% tanpa realisasi anggaran. Hal ini disebabkan capaian indikator program bersumber dari aktivitas non-anggaran (mis. pelaporan/kontribusi administratif PD, komitmen awal, atau penggunaan data eksisting), bukan dari pelaksanaan kegiatan/subkegiatan tahun berjalan.

Efisiensi substantif (anggaran vs output kunci):

Tidak efisien secara substansi, karena output inti (tersedianya dokumen data gender dan anak) 0%. Artinya, meskipun indikator program tercapai, hasil nyata yang menjadi tujuan program (produk dokumen/data terkelola) tidak dihasilkan. Program ini tidak efisien dan tidak efektif, karena tidak ada realisasi anggaran dan target kinerja tidak tercapai. Kondisi ini menunjukkan adanya masalah serius dalam perencanaan dan implementasi, seperti adanya kebijakan efisiensi anggaran pada Pemerintah Kota Salatiga. Dari perspektif efisiensi, nihilnya serapan anggaran tidak dapat diartikan efisien karena tidak menghasilkan output. Program ini menjadi area prioritas perbaikan pada tahun berikutnya, mengingat sistem data gender dan anak merupakan fondasi perencanaan berbasis bukti.

e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Anggaran sebesar Rp228.452.500 Realisasi Rp227.774.514 dengan serapan anggaran 99,70%. Capaian kinerja:

- Persentase anak terlibat dalam kegiatan anak: jauh di bawah target (target 64,06%; realisasi 4,5%)
- Output kegiatan layanan dan kelembagaan: 100%

Analisis efisiensi:

Program ini menunjukkan inefisiensi relatif terhadap outcome, karena serapan anggaran hampir maksimal, namun indikator outcome utama (partisipasi anak) sangat rendah. Meskipun output kegiatan (dokumen koordinasi, jumlah anak penerima layanan, penguatan lembaga) tercapai

100%, namun belum bertransformasi menjadi dampak pada partisipasi anak. Hal ini mengindikasikan bahwa desain intervensi lebih berorientasi pada kelembagaan dan administrasi, sementara aspek pemberdayaan langsung anak dan partisipasi substantif belum optimal. Ke depan, diperlukan realokasi atau penajaman belanja agar lebih berdampak langsung pada peningkatan keterlibatan anak.

f. Program Perlindungan Khusus Anak

Anggaran sebesar Rp339.199.000 Realisasi sebesar Rp283.066.052 dengan serapan anggaran 83,45%. Capaian kinerja:

- Persentase anak korban kekerasan meningkat (target 0,02; realisasi 0,06)
- Output layanan, KIE, dan penguatan lembaga: 100%

Analisis efisiensi:

Dari sisi output, program relatif efisien karena sebagian besar subkegiatan terlaksana dengan serapan anggaran di bawah pagu. Namun, dari sisi outcome, program ini belum efisien secara hasil, karena indikator persentase anak korban kekerasan tidak tercapai (bahkan meningkat). Hal ini menunjukkan bahwa belanja program masih dominan pada aspek penanganan dan penguatan sistem layanan, sementara efektivitas pencegahan kekerasan anak belum optimal. Dengan demikian, efisiensi penggunaan sumber daya perlu ditingkatkan melalui penguatan intervensi preventif, edukasi berbasis komunitas, dan keterlibatan keluarga serta sekolah.

**5. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Keberhasilan pencapaian sasaran 1 didukung oleh Program Kegiatan sebagai berikut:

**1. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

- a. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
  - (i) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG

b. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

(i) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

## 2. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

a. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

(i) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

b. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota

(i) Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

(ii) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

c. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

(i) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

## 3. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

a. Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

(i) Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

## 4. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

- a. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
  - (i) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
- b. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
  - (i) Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
  - (ii) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

#### 5. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

- a. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
  - (i) Sub Kegiatan Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA
- b. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - (i) Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - (ii) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK
- c. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - (i) Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten
  - (ii) Sub Kegiatan Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota

## 2. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sasaran : Mengendalikan pertumbuhan penduduk

### 1. Capaian Kinerja

NO.	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2025			TAHUN 2024	KENAIKAN /PENURUNAN	TARGET AKHIR RENSTR A	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA 2026
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI			
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (6)-(8)	(10)	(11)
1	Mengendalikan pertumbuhan penduduk	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	TFR (Total Fertility Rate)	%	2,2	2,02	108,18	1,7	-0,31	2,1	103,81%
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)									
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)									

Pengukuran capaian kinerja atas sasaran Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk pada Tahun 2025 dilakukan melalui indikator Total Fertility Rate (TFR). Target TFR Tahun 2025 ditetapkan sebesar 2,2, dengan realisasi sebesar 2,02, sehingga diperoleh tingkat capaian kinerja sebesar 108,18%.

Secara substantif, TFR merupakan indikator yang bersifat negatif, di mana semakin rendah angkanya menunjukkan kondisi yang semakin baik dalam konteks pengendalian pertumbuhan penduduk. Dengan demikian, realisasi TFR Tahun 2025 yang lebih rendah dari target menunjukkan bahwa upaya pengendalian fertilitas berjalan efektif dan sasaran kinerja telah tercapai bahkan melampaui target yang ditetapkan.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar 1,7, terdapat kenaikan sebesar 0,31 poin pada Tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan angka kelahiran dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga meskipun capaian terhadap target tahunan tergolong sangat baik, tren kenaikan tersebut tetap memerlukan perhatian agar tidak berkembang menjadi peningkatan yang signifikan pada tahun-tahun mendatang.

Dalam kaitannya dengan target akhir Renstra Tahun 2026 sebesar 2,1, realisasi Tahun 2025 sebesar 2,02 telah melampaui target jangka menengah dengan tingkat capaian sebesar 103,81%. Hal ini menunjukkan bahwa sasaran strategis dalam dokumen perencanaan telah tercapai lebih cepat dari waktu yang direncanakan.

Secara umum, capaian kinerja sasaran Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk pada Tahun 2025 dinilai berhasil dan efektif. Ke depan, diperlukan konsistensi dan penguatan pelaksanaan Program Pengendalian Penduduk, Program Pembinaan Keluarga Berencana, serta Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera guna menjaga stabilitas capaian serta mengantisipasi potensi kenaikan TFR pada periode berikutnya.

Dalam rangka melaksanakan urusan Pengendalian Penduduk DP3APPKB melaksanakan program-program dengan indikator sebagai berikut:

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2025			TAHUN 2024	KENAIKAN / PENURUNAN	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA 2026
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI			
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (6)-(8)	(10)	(11)
1	Mengendalikan pertumbuhan penduduk	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/ kelurahan	%	100	100	100%	100	0,00	100	100,00%
			Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 thn) per 1000 perempuan usia 15-49 thn (ASFR)	%	1,75	1,24	129,14%	0,63	0,61	1,74	128,74%
			Cakupan PUS yang istrinya di bawah 20 tahun	%	2	2,94	53%	0,07	2,87	1,8	61,22%

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2025			TAHUN 2024	KENAIKAN / PENURUNAN	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA 2026
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI			
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (6)-(8)	(10)	(11)
			Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	Tahun	22,1	21	95,02%	23	-2,00	22,1	95,02%
			Cakupan Pembinaan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (penyusunan Grand Design, Profil/ Parameter	%	90	100	111,11%	100	0,00	99	101,01%
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmetneed)	%	12	11,73	102,25%	8,51	3,22	11	93,36%

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2025			TAHUN 2024	KENAIKAN / PENURUNAN	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA 2026
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI			
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (6)-(8)	(10)	(11)
			Rasio Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)	rasio	1:2	1:2,5	125,00%	1:2,3	0,20	1:2	125,00%
			Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	27,57	41,19	149,40%	26,65	14,54	28,39	145,09%
			Rasio akseptor KB baru	%	73	70,86	97,07%	14,31	56,55	75	94,48%
			Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	%	78,3	65,76	83,98%	67,7	-1,94	78,4	83,88%
			Cakupan peserta KB aktif	%	84	78,17	93,06%	67,7	10,47	85	91,96%

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2025			TAHUN 2024	KENAIKAN / PENURUNAN	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA 2026
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI			
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (6)-(8)	(10)	(11)
			Persentase Fasilitas Kesehatan yang siap melayani KB MKJP	%	90	100	90%	100	0,00	90	90%
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)	rasio	1:2	1:1,9	95%	1:1,9	0,00	1:2	95,00%
			Cakupan Perkawinan Usia di Bawah 21 tahun	%	1,7	4,12	41,26%	0,39	3,73	1,6	38,83%
			Persentase Baduta Stunting	%	22	6,02	172,64%	5,75	0,27	19	168,32%

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2025			TAHUN 2024	KENAIKAN / PENURUNAN	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA 2026
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI			
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (6)-(8)	(10)	(11)
			Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB	%	82	97,47	118,87%	95,3	2,17	83	117,43%
			Cakupan Kader BKB yang Terlatih	%	87	87,73	100,84%	74,74	12,99	87	100,84%
			Cakupan Balita/ Anak dengan Tumbuh Kembang sesuai dengan Kartu Kembang Anak (KKA)	%	90	99,66	110,73%	100	-0,34	90	110,73%

Pelaksanaan sasaran Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk Tahun 2025 didukung oleh tiga program, yaitu Program Pengendalian Penduduk, Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), dan Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS). Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, secara umum sebagian besar indikator menunjukkan capaian yang baik hingga sangat baik, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang memerlukan perhatian dan penguatan.

Pada **Program Pengendalian Penduduk** menunjukkan kinerja yang relatif baik. Indikator cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap kelurahan tercapai 100%, menunjukkan bahwa sistem basis data keluarga telah tersedia secara menyeluruh sebagai dasar perencanaan intervensi program. Indikator Angka Kelahiran Remaja (ASFR) terealisasi sebesar 1,24 dari target 1,75 (capaian 129,14%). Mengingat indikator ini bersifat negatif (semakin rendah semakin baik), maka realisasi tersebut menunjukkan keberhasilan signifikan dalam pengendalian kelahiran pada kelompok usia remaja. Indikator cakupan pembinaan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk juga melampaui target dengan capaian 111,11%, mencerminkan optimalnya penyusunan dokumen perencanaan dan kebijakan pendukung. Namun demikian, terdapat indikator yang perlu mendapat perhatian, yaitu cakupan PUS dengan istri di bawah 20 tahun yang hanya mencapai 53%, serta Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) yang terealisasi 21 tahun dari target 22,1 tahun (95,02%). Kondisi ini menunjukkan masih adanya kecenderungan perkawinan usia muda yang berpotensi memengaruhi dinamika fertilitas dan kualitas keluarga di masa mendatang.

**Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)** menunjukkan capaian yang cukup kuat, khususnya pada indikator kualitas pelayanan dan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang. Indikator cakupan PUS yang ingin ber-KB namun tidak terpenuhi (Unmet Need) terealisasi sebesar 11,73% dari target 12% (capaian 102,25%). Karena indikator ini bersifat negatif, capaian tersebut menunjukkan keberhasilan dalam menekan kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi. Indikator persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP) menunjukkan capaian sangat baik sebesar 149,40%, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan metode kontrasepsi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, persentase fasilitas kesehatan yang siap

melayani KB MKJP tercapai 100%, menunjukkan dukungan sarana pelayanan yang memadai. Indikator rasio akseptor KB baru tercapai 97,07%, pemakaian kontrasepsi (CPR) tercapai sebesar 83,98% dan cakupan peserta KB aktif tercapai sebesar 93,06%. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan strategi komunikasi, edukasi, dan promosi untuk meningkatkan rekrutmen akseptor baru serta menjaga keberlanjutan kepesertaan aktif.

**Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)** menunjukkan capaian yang sangat baik pada aspek peningkatan kualitas keluarga dan tumbuh kembang anak. Indikator persentase baduta stunting terealisasi sebesar 6,02% dari target 22% (capaian 172,64%), yang menunjukkan keberhasilan signifikan dalam penurunan stunting. Indikator cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB serta cakupan balita dengan tumbuh kembang sesuai Kartu Kembang Anak (KKA) juga melampaui target dengan capaian masing-masing 118,87% dan 110,73%. Namun demikian, indikator cakupan perkawinan usia di bawah 21 tahun hanya mencapai 41,26%, menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya dan memerlukan perhatian serius dalam upaya pendewasaan usia perkawinan. Cakupan kader BKB yang terlatih juga mencapai 100,84% yang berarti bahwa semua kader BKB telah mendapatkan pelatihan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan program dalam rangka pencapaian sasaran Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk Tahun 2025 dapat dinilai berhasil, dengan sebagian besar indikator mencapai dan melampaui target tahunan maupun target akhir Renstra. Keberhasilan terutama terlihat pada pengendalian kelahiran remaja, peningkatan penggunaan MKJP, serta penurunan stunting.

Namun demikian, masih terdapat tantangan strategis yang perlu mendapat perhatian, khususnya terkait cakupan PUS yang istrinya di bawah 20 tahun dan perkawinan usia muda. Oleh karena itu, pada tahun berikutnya diperlukan penguatan intervensi pendewasaan usia perkawinan melalui KIE dan konsultasi pranikah.

## 2. Analisa Keberhasilan/Kegagalan dan Alternatif Solusi

### Analisis Keberhasilan Kinerja

Keberhasilan signifikan terlihat pada beberapa indikator strategis, khususnya yang berkaitan dengan pengendalian fertilitas dan peningkatan kualitas keluarga.

- a. Indikator Angka Kelahiran Remaja (ASFR) terealisasi jauh di bawah target, yang menunjukkan keberhasilan dalam menekan kelahiran pada kelompok usia remaja. Demikian pula, persentase baduta stunting menunjukkan penurunan yang sangat signifikan dibanding target, mencerminkan efektivitas intervensi pembinaan keluarga dan peningkatan kualitas pengasuhan anak.
- b. Pada Program Pembinaan Keluarga Berencana, indikator Unmet Need berhasil ditekan di bawah target yang ditetapkan, serta terjadi peningkatan signifikan pada penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Kondisi ini menunjukkan meningkatnya akses dan kualitas pelayanan KB serta kesadaran masyarakat dalam memilih metode kontrasepsi yang lebih efektif dan berkelanjutan.
- c. Selain itu, indikator pendukung sistem seperti cakupan data mikro keluarga dan kesiapan fasilitas kesehatan dalam pelayanan MKJP juga tercapai secara penuh, yang menunjukkan kesiapan infrastruktur dan tata kelola program berjalan dengan baik.

Secara umum, keberhasilan tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan program, sinergi lintas sektor, serta dukungan sumber daya yang memadai dalam mendukung pencapaian sasaran strategis.

### Analisis Kegagalan Kinerja

Meskipun sebagian besar indikator menunjukkan hasil yang baik, terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target secara optimal.

- a. Indikator Cakupan Peserta KB Aktif dan Unmetneed  
Cakupan peserta KB aktif (78,17%) belum maksimal ditandai dengan angka Unmetneed (11,73%) yang masih tinggi. Di mana pada tahun 2025 jumlah Peserta KB Aktif sejumlah 17.448 orang dengan Pasangan Usia Subur (PUS) sejumlah 26.533 orang, sehingga masih banyak PUS yang belum menggunakan KB. Rendahnya minat menjadi akseptor KB

disebabkan persepsi keliru terhadap efek samping kontrasepsi, kurangnya dukungan pasangan.

- b. Indikator yang berkaitan dengan perkawinan usia dini, termasuk cakupan PUS dengan istri di bawah 20 tahun dan cakupan perkawinan usia di bawah 21 tahun, belum mencapai target dan menunjukkan kecenderungan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini berpotensi memengaruhi dinamika fertilitas dan kualitas keluarga di masa mendatang sehingga memerlukan intervensi yang lebih terfokus pada pendewasaan usia perkawinan. Penurunan juga terlihat pada cakupan kader BKB yang terlatih, yang menunjukkan perlunya penguatan kapasitas dan pembinaan sumber daya manusia di tingkat masyarakat sebagai ujung tombak pelaksanaan program. Faktor penyebab ketidakberhasilan dipengaruhi oleh faktor sosial budaya, pola pikir masyarakat, serta kondisi ekonomi keluarga

Berdasarkan keseluruhan hasil pengukuran kinerja, pelaksanaan program dalam rangka pencapaian sasaran Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk Tahun 2025 dapat dikategorikan Berhasil, karena mayoritas indikator strategis telah mencapai dan melampaui target yang ditetapkan.

Keberhasilan terutama terlihat pada aspek pengendalian kelahiran remaja, peningkatan penggunaan MKJP, serta penurunan stunting. Namun demikian, masih diperlukan penguatan pada aspek pencegahan perkawinan usia dini, peningkatan akseptor KB baru agar capaian kinerja dapat lebih merata dan berkelanjutan pada tahun berikutnya.

### **3. Alternatif Solusi**

Berdasarkan hasil analisis keberhasilan dan kegagalan kinerja Tahun 2025, dirumuskan alternatif solusi sebagai upaya perbaikan dan penguatan capaian kinerja DP3APPKB pada tahun berikutnya, sebagai berikut:

- a. Cakupan PUS dengan Istri di Bawah 20 Tahun (53%)  
Permasalahan: Masih tingginya perkawinan usia muda.  
Alternatif Solusi:
  - Penguatan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) melalui sekolah, komunitas remaja, dan Forum GenRe.
  - Kolaborasi dengan KUA, Pengadilan Agama, dan Dinas Pendidikan untuk pencegahan perkawinan anak.

- Edukasi orang tua melalui BKB dan kegiatan pemberdayaan keluarga.
  - Kampanye publik berbasis data mikro keluarga pada wilayah risiko tinggi.
- b. **Median Usia Kawin Pertama (95,02%)**  
 Permasalahan: Penurunan usia kawin pertama perempuan.
- Alternatif Solusi:
- Integrasi materi kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga dalam kegiatan remaja.
  - Penguatan konseling pranikah di fasilitas kesehatan dan KUA.
  - Pemetaan desa/kelurahan dengan tren usia kawin rendah untuk intervensi prioritas.
  - Pelibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam advokasi usia ideal perkawinan.
- c. **Rasio Akseptor KB Baru (97,07%)**  
 Permasalahan: Masih terdapat ketakutan dan kekurangpahaman terhadap efek samping penggunaan KB.
- Solusi:
- Intensifikasi KIE berbasis segmentasi sasaran (PUS muda, pasca persalinan, pasangan baru).
  - Pelayanan KB jemput bola melalui pelayanan mobile dan momentum hari besar.
  - Pemberian insentif non-finansial (apresiasi/sertifikat) pada keluarahan dengan peningkatan akseptor tertinggi.
  - Optimalisasi kunjungan rumah oleh PLKB dan kader.
- d. **Cakupan Peserta KB Aktif (93,06%)**  
 Permasalahan:
- Kepesertaan KB yang belum maksimal, masih ada yang tidak ber-KB
  - Jumlah peserta KB Baru tidak cukup untuk menggantikan Peserta KB aktif yang drop out
- Solusi:
- Meningkatkan KIE dan konseling KB kepada PUS dan akseptor
- e. **Angka pemakaian kontrasepsi / CPR (83,98%)**

Permasalahan : Peserta KB suntik dan pil mengalami penurunan karena kekhawatiran akan efek samping pemakaian kontrasepsi

Solusi : Mengedukasi akseptor untuk menggunakan kontrasepsi jangka panjang

f. Cakupan Perkawinan Usia di Bawah 21 Tahun (41,26%)

Permasalahan: Peningkatan perkawinan usia dini.

Solusi:

- Advokasi kebijakan tentang pencegahan perkawinan anak.
- Pemberdayaan ekonomi keluarga rentan sebagai upaya pencegahan perkawinan dini.
- Penguatan pelaporan dan monitoring dispensasi kawin.

#### 4. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

a. Program Program Pengendalian Penduduk

Pada Tahun 2025, Program Pengendalian Penduduk didukung pagu anggaran sebesar **Rp556.672.000**, dengan realisasi sebesar **Rp500.376.800** atau **89,89%** dari pagu yang ditetapkan. Tingkat serapan anggaran tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan optimal tanpa terjadi pemborosan, serta masih dalam batas kewajaran pelaksanaan program.

Apabila dikaitkan dengan capaian indikator kinerja, program ini menunjukkan hasil yang sangat baik. Indikator *cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga* tercapai 100%. Indikator *Angka Kelahiran Remaja (ASFR)* terealisasi sebesar 0,63 dari target 1,75, yang berarti terjadi penurunan signifikan (over achievement). Demikian pula, *cakupan pembinaan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk* tercapai 100% dari target 90%.

Dengan tingkat serapan anggaran 89,89% dan mayoritas indikator mencapai atau melampaui target, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya keuangan pada Program Pengendalian Penduduk tergolong **efisien**. Program ini mampu menghasilkan output dan outcome yang optimal tanpa harus merealisasikan anggaran secara penuh (100%).

b. Program Pembinaan Keluarga Berencana Pada Tahun 2025, Program Pembinaan Keluarga Berencana didukung pagu anggaran sebesar **Rp1.673.905.411**, dengan realisasi sebesar **Rp1.495.231.416** atau **89.33%** dari pagu yang dialokasikan. Tingkat serapan ini menunjukkan bahwa terdapat efisiensi belanja sebesar 10,67% dari total pagu, yang perlu dianalisis keterkaitannya dengan capaian indikator program. Secara umum, beberapa indikator outcome strategis menunjukkan hasil yang cukup baik, antara lain Unmet Need terealisasi 8,51% dari target 14% (lebih baik dari target), Persentase Fasilitas Kesehatan siap MKJP tercapai 100%, Rasio PLKB menunjukkan kinerja relatif baik (1:2,5). Namun demikian, terdapat indikator yang belum optimal, seperti Rasio akseptor KB baru (24,5% dari target 73%), CPR (Angka Pemakaian Kontrasepsi) (65,44% dari target 67,7%), Cakupan peserta KB aktif (65,44% dari target 67,7%).

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi efisiensi anggaran secara nominal (serapan 89,33%), tidak seluruh outcome program meningkat secara proporsional. Dengan demikian, efisiensi pada tingkat program dapat dikategorikan cukup efisien namun belum sepenuhnya efektif pada beberapa indikator strategis.

c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahter (KS)

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) memiliki pagu anggaran sebesar **Rp1.268.051.000** dengan realisasi sebesar **Rp1.241.143.672.000** atau **97,88%**.

Tingkat serapan yang sangat tinggi ini menunjukkan bahwa secara administratif penggunaan anggaran berada pada kategori sangat efisien dan optimal, dengan sisa anggaran hanya 2,12%. Dari sisi indikator kinerja program, capaian menunjukkan hasil yang sangat baik Persentase Baduta Stunting jauh lebih rendah dari target (5,75% dari target 22%), Cakupan Anggota BKB ber-KB melampaui target (97,47% dari 82%), Cakupan Balita dengan tumbuh kembang sesuai KKA mencapai 99,66% (target 90%). Namun terdapat indikator yang belum optimal Cakupan Kader BKB Terlatih baru mencapai 53,69% dari target 87%. Cakupan Perkawinan Usia di Bawah 21 tahun yang merupakan indikator negatif dimana target 1,7% realisasi 4,12% dan Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dengan target rasio 1:2 realisasi 1:1,9 atau baru mencapai 95%. Secara keseluruhan, dengan serapan 97,88% dan mayoritas indikator

melampaui target, program ini dapat dikategorikan sangat efisien dan sangat efektif.

## **5. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Keberhasilan pencapaian sasaran didukung oleh Program Kegiatan sebagai berikut:

### **1. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**

- a. Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
  - (i) Sub Kegiatan Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
  - (ii) Sub Kegiatan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal
  - (iii) Sub Kegiatan Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan
  - (iv) Sub Kegiatan Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan
- b. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
  - (i) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
  - (ii) Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
  - (iii) Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB

### **2. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**

- a. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
  - (i) Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana
  - (ii) Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini

- Lokakarya (Minilok) pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana
- (iii) Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
  - (iv) Sub Kegiatan Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
- b. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
- (i) Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
- c. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
- (ii) Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
  - (iii) Sub Kegiatan Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP
  - (iv) Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
  - (v) Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
  - (vi) Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan KB Pria
- d. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
- (i) Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas
- 3. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**
- a. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

- (i) Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
  - (ii) Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))
  - (iii) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))
  - (iv) Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))
- b. Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- (i) Sub Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
  - (ii) Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja
  - (iii) Sub Kegiatan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)
  - (iv) Sub Kegiatan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)

### 3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

#### 1. Capaian Kinerja

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TAHUN 2025			TAHUN 2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA 2026
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (6)-(8)	(10)	(11)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	89,0	89,85	100,96%	85,44	4,41	90	99,83%

Pada Tahun 2025, target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ditetapkan sebesar 89,0%, dengan realisasi sebesar 89,85%. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja mencapai 100,96%, yang menunjukkan bahwa indikator ini berhasil melampaui target yang telah ditetapkan.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar 85,44%, terjadi kenaikan sebesar 4,41 poin pada Tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh perangkat daerah, baik dari aspek kecepatan layanan, kejelasan prosedur, kompetensi petugas, maupun sarana dan prasarana pendukung pelayanan.

Jika dikaitkan dengan target akhir Renstra Tahun 2026 sebesar 90%, capaian Tahun 2025 telah mencapai 99,83% dari target akhir tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja program berada pada jalur yang sangat baik dan hampir mencapai sasaran strategis jangka menengah satu tahun lebih awal.

Secara keseluruhan, indikator Indeks Kepuasan Masyarakat menunjukkan kategori Sangat Baik, serta mencerminkan peningkatan kualitas tata kelola dan pelayanan publik yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

## **2. Analisa Keberhasilan/Kegagalan**

### **Analisis Keberhasilan Kinerja**

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2025 sebesar 89,85% dari target 89,0% (capaian 100,96%) menunjukkan bahwa Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berhasil mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini juga ditandai dengan peningkatan sebesar 4,41 poin dibandingkan realisasi Tahun 2024.

Keberhasilan pencapaian indikator ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama sebagai berikut:

- **Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**

Terjadi perbaikan pada standar pelayanan, penyederhanaan prosedur, serta peningkatan kepastian waktu layanan. Hal ini berdampak langsung pada persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.

- **Penguatan Kompetensi Aparatur**

Pelaksanaan pembinaan, peningkatan kapasitas, serta pengawasan internal mendorong aparatur lebih profesional, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

- **Optimalisasi Sarana dan Prasarana Pelayanan**  
Perbaikan fasilitas layanan dan dukungan sistem administrasi yang lebih tertib turut meningkatkan kenyamanan dan kemudahan masyarakat dalam memperoleh pelayanan.
- **Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi**  
Adanya keterbukaan informasi pelayanan, mekanisme pengaduan masyarakat, serta tindak lanjut atas keluhan pengguna layanan meningkatkan kepercayaan publik terhadap instansi.
- **Konsistensi Monitoring dan Evaluasi**  
Evaluasi berkala terhadap kinerja pelayanan memungkinkan perbaikan yang cepat terhadap kendala yang muncul, sehingga mutu layanan tetap terjaga.

### **Analisis Kegagalan Kinerja**

Meskipun capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2025 sebesar 89,85% telah melampaui target tahunan (89,0%), apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2026 sebesar 90%, masih terdapat kekurangan. Dengan demikian, capaian terhadap target akhir Renstra baru mencapai 99,83%, sehingga secara strategis masih terdapat ruang perbaikan.

Beberapa faktor yang berpotensi menjadi penyebab belum tercapainya target akhir Renstra antara lain:

- **Ketidaktercapaian Kualitas Pelayanan**  
Meskipun secara umum pelayanan dinilai baik, masih terdapat variasi kualitas layanan antar unit pelayanan, terutama pada aspek kecepatan layanan dan konsistensi standar pelayanan.
- **Responsivitas terhadap Pengaduan**  
Tindak lanjut pengaduan masyarakat belum sepenuhnya optimal dalam hal kecepatan dan umpan balik kepada pelapor, yang dapat memengaruhi persepsi kepuasan.

- Adaptasi Digitalisasi Layanan  
Transformasi layanan berbasis digital belum sepenuhnya dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh pengguna layanan, sehingga sebagian masyarakat masih mengalami kendala dalam mengakses layanan secara daring.
- Ekspektasi Masyarakat yang Semakin Tinggi  
Seiring meningkatnya kualitas pelayanan, ekspektasi masyarakat juga meningkat. Hal ini menyebabkan standar kepuasan menjadi lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

### 3. Alternatif Solusi

Meskipun capaian IKM Tahun 2025 telah melampaui target tahunan, tetapi masih terhadap kekurangan dengan target akhir Renstra 2026. Untuk menutup kesenjangan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis dan terukur sebagai berikut:

- a. Standarisasi dan Penguatan Mutu Pelayanan, dengan:
  - Menyusun dan menegakkan standar operasional prosedur (SOP) yang seragam di seluruh unit layanan.
  - Mengembangkan indikator kinerja unit layanan berbasis kepuasan pengguna.
- b. Peningkatan Responsivitas Pengaduan, dengan:
  - Mengoptimalkan sistem pengelolaan pengaduan masyarakat berbasis digital.
  - Menetapkan batas waktu penyelesaian pengaduan secara tegas dan terukur.
  - Melakukan monitoring dan publikasi tindak lanjut pengaduan sebagai bentuk transparansi.
- c. Percepatan Transformasi Digital Pelayanan
  - Meningkatkan kemudahan akses layanan daring melalui penyederhanaan tampilan dan prosedur.
  - Memberikan pendampingan atau edukasi kepada masyarakat terkait penggunaan layanan digital.
  - Mengintegrasikan sistem pelayanan untuk mempercepat proses administrasi.

- d. Peningkatan Kompetensi dan Budaya Layanan Prima
  - Melaksanakan pelatihan pelayanan prima dan komunikasi publik bagi aparatur secara berkala.
  - Mendorong penerapan budaya kerja yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.
  - Memberikan penghargaan kepada unit atau pegawai dengan nilai kepuasan tertinggi.
- e. Penguatan Survei dan Evaluasi Berbasis Data
  - Melakukan survei kepuasan masyarakat secara lebih komprehensif dan periodik.
  - Menganalisis dimensi IKM yang memiliki nilai terendah untuk menjadi prioritas perbaikan.
  - Menyusun rencana aksi perbaikan berbasis hasil survei.

#### **4. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Pada Tahun 2025 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, realisasi anggaran mencapai 91,77% dengan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 100,96% (melampaui target).

Seluruh indikator output kegiatan tercapai 100%, sementara beberapa komponen belanja seperti pemeliharaan kendaraan dan jasa utilitas terealisasi di bawah pagu tanpa mengurangi target kinerja. Hal ini menunjukkan adanya penghematan dan pengendalian belanja yang baik.

Dengan capaian kinerja yang optimal dan serapan anggaran yang terkendali, penggunaan sumber daya pada program ini dapat dikategorikan efisien dan efektif dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

#### **5. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Keberhasilan pencapaian sasaran didukung oleh Program Kegiatan sebagai berikut:

## 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - (i) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - (i) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - (ii) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - (i) Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - (i) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - (i) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - (ii) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - (iii) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - (iv) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - (v) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
  - (vi) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - (i) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - (ii) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - (i) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - (ii) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - (iii) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- (i) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - (ii) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - (iii) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - (iv) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - (v) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

## B. REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun Anggaran 2025, total anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) sebesar **Rp11.855.187.678** dengan realisasi sebesar **Rp10.848.380.252** atau mencapai **91,51%**. Tingkat serapan tersebut menunjukkan pengelolaan anggaran yang cukup optimal dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja.

Pada **Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**, anggaran sebesar Rp8.356.559.267 terealisasi Rp7.611.628.364 (91,09%). Beberapa program menunjukkan tingkat serapan yang sangat baik, antara lain:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (91,77%);
- Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (95,99%);
- Program Peningkatan Kualitas Keluarga (94,75%);
- Program Pemenuhan Hak Anak (99,70%).

Namun demikian, terdapat program dengan serapan relatif rendah, seperti:

- Program Perlindungan Perempuan (63,75%), khususnya pada kegiatan layanan rujukan lanjutan;

- Program Perlindungan Khusus Anak (83,45%);

Pada **Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**, dari pagu Rp3.498.628.411 terealisasi Rp3.236.751.888 atau sebesar 92,51%. Program Pengendalian Penduduk mencapai 89,89%, Program Pembinaan KB 89,33%, dan Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera mencapai 97,88%. Beberapa kegiatan seperti pendampingan keluarga berisiko stunting dan operasional Kampung KB menunjukkan serapan di atas 96%, mencerminkan prioritas dan konsistensi pelaksanaan.

Secara umum, realisasi anggaran Tahun 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar program dan kegiatan terlaksana dengan baik dan didukung serapan anggaran yang memadai. Sisa anggaran yang tidak terealisasi sebagian besar disebabkan oleh efisiensi belanja, penyesuaian kebutuhan riil kegiatan, serta dinamika pelaksanaan di lapangan.

Dengan tingkat realisasi sebesar 91,51%, penggunaan anggaran DP3APPKB Tahun 2025 dapat dikategorikan efektif dan cukup efisien dalam mendukung pencapaian target kinerja organisasi.

## BAB IV PENUTUP

Secara umum, capaian kinerja DP3APPKB Tahun 2025 menunjukkan hasil yang positif dan selaras dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Hal ini tercermin dari tingkat realisasi anggaran sebesar 91,51% yang diikuti dengan capaian kinerja pada sebagian besar program dan kegiatan yang berada pada kategori baik hingga sangat baik. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Peningkatan Kualitas Keluarga, Pemenuhan Hak Anak, serta Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera menunjukkan tingkat serapan dan capaian yang tinggi, sehingga berkontribusi signifikan terhadap pencapaian sasaran strategis perangkat daerah.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa program dengan capaian realisasi anggaran yang belum optimal, khususnya pada Program Perlindungan Perempuan, Perlindungan Khusus Anak, serta Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak. Kondisi ini dipengaruhi oleh dinamika pelaksanaan kegiatan, keterbatasan kemampuan keuangan, serta penyesuaian kebutuhan riil di lapangan. Hal tersebut menjadi bahan evaluasi penting dalam rangka perbaikan perencanaan dan pengendalian kinerja di masa mendatang.

Sebagai langkah ke depan, DP3APPKB akan melakukan penguatan pada aspek perencanaan berbasis data, peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi, optimalisasi pemanfaatan anggaran, serta penguatan koordinasi lintas sektor dan pemangku kepentingan. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan sistem informasi akan terus dikembangkan guna mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan komitmen terhadap prinsip akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi, DP3APPKB berupaya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja organisasi pada tahun-tahun berikutnya, sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih optimal dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana.

Keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2025 merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran perangkat daerah, dukungan pemangku kepentingan, serta partisipasi aktif masyarakat. Sinergi antara perencanaan yang matang, pelaksanaan kegiatan yang terukur, dan pengawasan yang berkelanjutan menjadi fondasi penting dalam memastikan setiap program berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkala juga menjadi instrumen strategis dalam mengidentifikasi kendala sekaligus merumuskan langkah-langkah perbaikan yang konstruktif dan berkesinambungan.

Ke depan, tantangan pembangunan akan semakin kompleks seiring dengan dinamika sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan inovasi program, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta komitmen berkelanjutan dalam menjaga kualitas layanan publik. Dengan semangat perbaikan berkelanjutan dan tata kelola pemerintahan yang baik, DP3APPKB optimis dapat meningkatkan capaian kinerja yang lebih berkualitas dan berdampak nyata bagi masyarakat Kota Salatiga.

Salatiga,

2026

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PELINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KOTA SALATIGA



**SUPARLI, S.K.M., M.Kes**  
Pembina Utama Tk.I  
NIP. 19730616199031007